

Judul : Kebakaran Kapal Berulang Komisi V DPR Panggil Kemenhub
Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

TRANSPORTASI

Kebakaran Kapal Berulang, Komisi V DPR Panggil Kemenhub

JAKARTA, KOMPAS — Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil sejumlah mitra kerja yang bertanggung jawab dalam keselamatan pelayaran, termasuk Kementerian Perhubungan. Pemanggilan ini merupakan buntut dari insiden kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa II pada Minggu (2/8/2026) dan KMP Putri Yasmin pada Rabu (12/8).

Lembaga lain yang akan dipanggil adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Badan Nasional Penanggulangan dan Pertolongan (Basarnas), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Ketua Komisi V DPR Lasarus menyempatkan undangan yang semestinya hanya membahas kecelakaan KMP Mutiara Sentosa II justru disusul insiden lain yang menimpa KMP Putri Yasmin.

Sejumlah catatan menjadi perhatian utama Komisi V, terutama lemahnya pengawasan di seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), khususnya di lokasi yang menangani masalah kapal ini. Persoalan lain adalah lemahnya pendataan penumpang.

"Kelemahan yang paling kelihatan adalah ketidakcocokan antara data manifes (daftar muatan) dan jumlah penumpang yang ada. Semua (ada) selisih. Jumlah orang saja mereka enggak bisa mengamati, bagaimana mereka menentukan laik atau tidaknya kapal itu berlayar?" tutur Lasarus saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/8).

Kebakaran yang melanda KMP Mutiara Sentosa II di Sumenep, Jawa Timur, dan KMP Putri Yasmin di Padangbai, Bali, seluruhnya merupakan kapal *roll-on/roll-off* (roro). Hal ini mengindikasikan implementasi prosedur operasi standar (SOP) muatan yang dibawa semua kendaraan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.

"Mana barang yang berbahaya dan tidak berbahaya. Saya lihat enggak dipisah oleh mereka (petugas)," kata Lasarus.

KMP Mutiara Sentosa II yang melayani rute Surabaya-Makassar terbakar pada Minggu (2/8) saat berada di perairan utara Sumenep. Berdasarkan data operasi SAR, 238 orang berhasil dievakuasi, 5 orang di antaranya meninggal (*Kompas.id*, 10/8/2026).

Belum genap dua pekan setelah tragedi tersebut, kebakaran serupa menimpa KMP Putri Yasmin pada Rabu. Armada

Kelemahan yang paling kelihatan ialah ketidakcocokan antara data manifes dan jumlah penumpang yang ada.

Lasarus

yang berangkat dari Padangbai menuju Lembar itu terbakar di perairan Bali.

Berdasarkan laporan sementara pada Rabu malam, 114 penumpang tercatat dalam data manifes, belum termasuk awak kapal. Namun, jumlah penumpang yang dievakuasi mencapai 173 orang, 1 orang di antaranya meninggal.

Dalam siaran pers terakhir pada Rabu malam, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui adanya perbedaan data manifes dengan jumlah penumpang yang dievakuasi. Ia menginstruksikan verifikasi menyeluruh guna memastikan data manifes dan jumlah orang yang ditemukan. Adanya perbedaan tersebut merupakan temuan serius yang akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi secara komprehensif.

"Untuk diketahui, ketika kapal mengajukan surat izin berlayar, pada umumnya jumlah penumpang sudah didaftarkan. Meski demikian, sebelum kapal benar-benar berlayar, biasanya ada penambahan penumpang yang tidak dilaporkan. Ini menjadi bahan evaluasi," ungkapnya.

Mengenai penyebab kebakaran, Dudy menyerahkan proses investigasi kepada KNKT. Sebagai catatan, KMP Putri Yasmin dinyatakan dalam kondisi laik laut berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir pada Juni 2026.

Operasi penyelamatan akan dilakukan hingga sepekan mendatang. Posko aduan masyarakat juga telah dibuka. Apabila merasa kehilangan anggota keluarganya, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas posko.

Masalah kronis

Guru Besar Logistik Maritim Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Sepuluh Nopember Surabaya Saut Gurning berpendapat, data manifes penumpang yang tidak akurat hampir selalu terjadi dalam setiap insiden kecelakaan kapal.

Sangat besar kemungkinan perbedaan data manifes antar-

instansi, baik di operator kapal, pengelola pelabuhan, dinas perhubungan, maupun instansi SAR, bukan sekadar insiden yang hanya terjadi pada KMP Mutiara Sentosa I/II. "Melainkan penyakit kronis yang hampir merata di lintasan penyeberangan Indonesia, termasuk pada kasus KMP Putri Yasmin," lanjutnya.

Dalam catatannya, ketidakakuratan data manifes kapal penyeberangan dipicu oleh tiga faktor utama: sistem penjualan tiket berbasis jenis kendaraan (bukan per penumpang) yang memicu munculnya penumpang tidak terdaftar, maraknya tiket manual dan keterlibatan calo, serta ketiadaan pangkalan data tunggal (*no single source of truth*).

Empat pemangku kepentingan, yakni operator kapal, syahbandar/BPTD, pengelola pelabuhan (ASDP), dan Jasa Raharja, juga masih bekerja dengan data terpisah yang tidak tersinkronisasi secara *real time*. Kondisi ini berdampak serius saat terjadi kecelakaan, mulai dari menyulitkan tim SAR menentukan target pencarian korban, menyulitkan klaim asuransi bagi penumpang yang tidak terdaftar, hingga membuka celah bagi operator untuk menghindar dari tanggung jawab hukum atas kelebihan muatan (*overloading*).

Anggota Komisi V DPR, Irine Yusiana Roba, menegaskan bahwa tragedi beruntun KMP Mutiara Sentosa II dan KMP Putri Yasmin merupakan peringatan keras sekaligus kegagalan fatal dalam pengawasan operasional pelayaran nasional. Ketidaksesuaian data manifes dan korban yang dievakuasi membuktikan adanya akar masalah struktural.

Untuk itu, ia mendesak Kemenhub bersama kepolisian melakukan investigasi hukum mendalam terhadap syahbandar, petugas pelabuhan, dan operator kapal, serta menuntut sanksi tegas berupa pembekuan izin bagi perusahaan dengan rekam jejak buruk.

Irine juga merekomendasikan tiga langkah teknis darurat. Pertama, KNKT didesak mempercepat rilis temuan awal penyebab kebakaran kapal roro agar Kemenhub dapat menerbitkan instruksi keselamatan darurat. Kedua, PT ASDP dan otoritas pelabuhan wajib mengintegrasikan sistem *e-ticketing* dengan *clearance* berlapis. Ketiga, Basarnas bersama pemilik kapal diinstruksikan menggelar audit kapasitas alat penyelamatan darurat (AVE).